



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) UNTUK
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**

Oleh :

SASRIKA HASDIYANTI

07 955 028

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**



No Alumni Universitas

SASRIKA HASDIYANTI

No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 08 Februari 1986 b). Nama Orang Tua : Rusdi dan Haslen Hayati c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 07955028 f). Tanggal Lulus : 14 Agustus 2010 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,07 i). Lama Studi : 3 tahun j). Alamat Orang Tua : Jl. Sudirman No. 83 RT 01/ RW 01 Kel. Balai Gadang Kec. Payakumbuh Utara

PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Skripsi S-1 Oleh : **Sasrika Hasdiyanti** Pembimbing : **DR. Suhairi, M.Si, Ak**

Abstrak

Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun analisa standar belanja khususnya untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

Data yang digunakan adalah data primer yang telah dipublikasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. OLS merupakan metode peramalan yang akan meramalkan standar biaya untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu (*Cost Driver*) yaitu : jumlah kegiatan, jumlah pegawai dan tingkat inflasi. Hasil penelitian ini berupa persamaan ASB dimana standar belanja kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dipengaruhi oleh biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel untuk kegiatan ini dipengaruhi oleh jumlah kegiatan, jumlah pegawai dan tingkat inflasi. Berdasarkan data-data yang diperoleh, apabila dimasukkan dalam persamaan ASB maka akan di peroleh standar biaya untuk kegiatan tersebut.

Keyword: Jumlah Kegiatan, Jumlah Pegawai dan Tingkat Inflasi

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Agustus 2010, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Drs. H. Fauzi Saad, Ak	Dra. Warnida, Akt, MM

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi : **DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak**
NIP. 196009111986031001

_____ Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan :
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan sentralisasi menjadi desentralisasi. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan "Otonomi Daerah". Hal tersebut ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara mempertanggungjawabkan keuangan pusat, dan khususnya daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, menurut Kunarjo (1993) suatu negara pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain, alokasi dana untuk sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan atau jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi yang meliputi antara lain, kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan, pendapatan dan kekayaan, dimaksudkan agar dapat mengurangi tingkat kesenjangan dalam masyarakat; fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain, pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter agar terpelihara kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Salah satu tanggung jawab yang sangat penting adalah pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, di mana sumber-sumber penerimaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat secara transparan sehingga

tidak menimbulkan eksese negatif dimasyarakat yang dapat menimbulkan gejala sosial. Mardiasmo (2000: 11) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah dimana sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan tersebut berbagai kebijakan telah dikeluarkan diantaranya adalah PP 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang salah satu point pentingnya adalah menuntut pertanggungjawaban kinerja atas anggaran yang digunakan. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pada kedua PP diatas telah di singgung mengenai penganggaran yang berbasis kinerja dan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja, tapi bagaimana teknis pelaksanaanya belum dijelaskan secara terperinci.

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) harus mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB). ASB merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran. Analisa Standar Belanja merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional.

Analisis standar belanja merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Analisis Standar Belanja berisikan kebijakan mengenai ketentuan batas normal harga satuan unit biaya, baik yang bersifat rutin maupun program sehingga perkiraan kewajaran anggaran dapat ditentukan.

ASB tidak dimaksudkan untuk menentukan standar semua jenis belanja kegiatan melainkan untuk belanja kegiatan yang memiliki karakteristik tertentu oleh karena itu perlu pemahaman terhadap setiap jenis kegiatan dan sifat belanja. Pemahaman tersebut didasarkan pada pengelompokkan kegiatan dan konsep klasifikasi biaya (belanja). Selain hal diatas kemampuan mengelola faktor pemicu juga merupakan kunci keberhasilan organisasi saat ini. Untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini dipicu (*sebagai cost drivernya*) adalah banyak kegiatan, jumlah pegawai serta tingkat inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS . 2007 . *Kota Pariaman dalam Angka Tahun 2006*. Padang . Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
- BPS . 2008 . *Kota Pariaman dalam Angka Tahun 2007*. Padang . Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
- BPS . 2009 . *Kota Pariaman dalam Angka Tahun 2008*. Padang . Badan Pusat Statistik Sumatera Barat
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006 *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Bismo, Serijo. DEA.,TGP-FTUI Modul 3- *Regresi Linear dengan Metode Kuadran Terkecil*
- Erick W, Nooren dan Ray H.Garrison. 2000. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: BPFE, UI.
- Hongren *et al.*. 2000 *Cost Accounting A Managerial Emphasis*. Prentice Hall. New Jersey
- http://pustaka.net/tugas.akhir/tesis_magister.ekonomika.pembangunan .2002. *Aplikasi Model Standar Analisa Belanja Pada bagian Sekretarust Bappeda Kota Bitung Tahun Anggaran 2002*
- http://pustaka.net/tugas.akhir/tesis_magister.ekonomika.pembangunan .2001. *Standar Analisa Belanja pengeluaran pemerintah kabupaten Kerinci studi kasus pada kantor kebersihan, peedam kebakaran dan pertamanan pemakaman*
- http://pustaka.net/tugas.akhir/tesis_magister.ekonomika.pembangunan .2004. *Simulasi SAB Dalam Penyusunan Anggaran Daerah Pemko Tangerang Tahun Anggaran 2004*